

Jejak Lestari

Memperkuat Tata Kelola Iklim melalui Kolaborasi REDD+

Sulawesi Tenggara
Perkuat Arsitektur
REDD+ dan
Pembangunan
Rendah Karbon untuk
Mendukung Target Iklim
Nasional

Patroli Partisipatif
Perkuat Upaya
Pencegahan Kebakaran
Hutan di
Sulawesi Tenggara

Workshop Pembentukan
Desa ProKlim Perkuat
Aksi Iklim Masyarakat dan
Implementasi REDD+ di
Sulawesi Tenggara

Seminar Inventarisasi Gas
Rumah Kaca Perkuat
Dasar Kebijakan
Pembangunan Rendah
Karbon di Sulawesi
Tenggara

Pengantar

Buletin Triwulan II Program Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 Sulawesi Tenggara ini diterbitkan sebagai media untuk mendokumentasikan berbagai perkembangan, pembelajaran, dan praktik baik dalam pelaksanaan program selama periode April–Juni 2026. Publikasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat diseminasi informasi sekaligus mendorong pertukaran pengetahuan di antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi REDD+ di Sulawesi Tenggara.

Sepanjang triwulan ini, berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk memperkuat fondasi pembangunan rendah karbon di Sulawesi Tenggara. Mulai dari penguatan arsitektur REDD+ daerah, penyelenggaraan Program Kampung Iklim (ProKlim), penyusunan inventarisasi gas rumah kaca, patroli partisipatif pencegahan kebakaran hutan, hingga rehabilitasi hutan dan lahan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target penurunan emisi membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan berbagai mitra pembangunan.

Melalui buletin ini, pembaca diajak melihat bagaimana kebijakan, penguatan kapasitas, dan aksi di tingkat tapak saling terhubung dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan pembangunan yang berketahanan iklim. Berbagai artikel yang disajikan tidak hanya merekam capaian program, tetapi juga menampilkan pengalaman, tantangan, serta pembelajaran yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan implementasi REDD+ di masa mendatang.

Kami berharap buletin ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat, memperluas pemahaman mengenai upaya pengendalian perubahan iklim di Sulawesi Tenggara, serta mendorong semakin kuatnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang rendah emisi, inklusif, dan berkelanjutan.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program maupun penyusunan buletin ini. Semoga publikasi ini memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pencapaian target iklim di tingkat daerah maupun nasional.

Tim Redaksi
Buletin RBP REDD+
GCF Output 2
Sulawesi Tenggara

Daftar Isi

Pengantar	01
Daftar Isi	02
Sulawesi Tenggara Perkuat Arsitektur REDD+ dan Pembangunan Rendah Karbon untuk Mendukung Target Iklim Nasional	03
Patroli Partisipatif Perkuat Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan di Sulawesi Tenggara	06
Infografis: Mencegah Api, Menjaga Karbon Hutan	09
Workshop Pembentukan Desa ProKlim Perkuat Aksi Iklim Masyarakat dan Implementasi REDD+ di Sulawesi Tenggara	13
Seminar Inventarisasi Gas Rumah Kaca Perkuat Dasar Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon di Sulawesi Tenggara	17
Wawancara: Alimuddin, S.P., M. Si., Kepala KPH Unit XXI Laiwoi Tenggara	20
Penutup	22

Sulawesi Tenggara Perkuat Arsitektur REDD+ dan Pembangunan Rendah Karbon untuk Mendukung Target Iklim Nasional

Kendari, 13 Mei 2026 — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kelompok Kerja (POKJA) REDD+ Sulawesi Tenggara memperkuat langkah strategis menuju pembangunan rendah karbon melalui Pertemuan Rutin POKJA REDD+ Sulawesi Tenggara pada 12–13 Mei 2026 di Kendari. Forum ini menjadi bagian penting dalam mempercepat penguatan tata kelola iklim daerah, penyusunan arsitektur REDD+ subnasional, serta pengembangan kolaborasi multipihak untuk mendukung target penurunan emisi Indonesia menuju FOLU Net Sink 2030.

Sebagai salah satu provinsi prioritas REDD+ di Indonesia, Sulawesi Tenggara memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda iklim nasional melalui perlindungan kawasan hutan, pengelolaan bentang alam berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, serta penguatan ekonomi hijau berbasis masyarakat. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, akademisi, pengelola kawasan, OPD teknis, dan lembaga perantara (lemtara) untuk memperkuat sinergi implementasi di tingkat tapak.

Ketua POKJA REDD+ Sultra yang juga Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa pembangunan rendah karbon telah menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah dan membutuhkan dukungan kolaboratif lintas sektor.



"Kebersamaan kita dalam tim ini sudah dituangkan dalam SK Gubernur. Kami berharap seluruh pihak terus memperkuat kolaborasi sehingga target pembangunan rendah karbon dapat tercapai secara bersama,"

Dr. Mustakim Darwis, SP., M.Si.

Ketua POKJA REDD+ Sultra & Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara

Diskusi dalam forum menyoroti peluang Sulawesi Tenggara dalam pengembangan skema pembiayaan karbon dan implementasi REDD+ berbasis hasil (Result Based Payment). Narasumber Abdul Syukur Ahmad menyampaikan bahwa Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi prioritas nasional dengan potensi penyerapan emisi karbon yang besar dan bernilai strategis bagi pembangunan daerah.

"Sultra adalah salah satu provinsi prioritas yang berpeluang menyerap emisi karbon cukup besar. Ini menjadi peluang penting untuk mendorong pembangunan hijau sekaligus memperkuat posisi daerah dalam skema pendanaan iklim,"

Abdul Syukur Ahmad — Narasumber



la juga menekankan pentingnya penguatan arsitektur REDD+ daerah, termasuk penyusunan Forest Reference Level (FRL), sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), safeguard, serta penguatan Rencana Aksi Daerah REDD+ yang selaras dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam sesilainya, Prof. Darmawan Salman menekankan bahwa pembangunan rendah karbon membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, komunitas lokal, akademisi, dan sektor swasta secara setara.

Menurutnya, penguatan kelembagaan masyarakat dan tata kelola multipihak menjadi fondasi penting untuk memastikan aksi mitigasi perubahan iklim dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.



"Pemerintah, swasta, dan komunitas adalah saluran yang harus diperkuat secara bersama,"

— Prof. Darmawan Salman

Pertemuan ini juga membahas berbagai agenda prioritas implementasi REDD+ di Sulawesi Tenggara, termasuk penguatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK), Program Kampung Iklim (ProKlim), rehabilitasi hutan dan lahan, patroli kawasan hutan, pengembangan agroforestri, hingga penguatan safeguard sosial dan lingkungan.

Pada hari kedua, peserta mendapatkan asistensi teknis penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2021 untuk memastikan seluruh program memiliki indikator yang terukur, akuntabel, dan terhubung langsung dengan target penurunan emisi daerah.

Forum ini menegaskan komitmen Sulawesi Tenggara dalam memperkuat implementasi REDD+ subnasional yang telah berjalan dan terintegrasi dengan agenda pembangunan daerah, melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas teknis, serta pengembangan aksi mitigasi berbasis masyarakat dan bentang alam.

Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, SCF sebagai lembaga perantara (Lemtara), akademisi, komunitas, dan sektor lainnya, Sulawesi Tenggara optimistis dapat menjadi model pembangunan hijau yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia, sekaligus membuka peluang kemitraan strategis yang lebih luas dalam mendukung agenda iklim global.



Patroli Partisipatif Perkuat Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan di Sulawesi Tenggara



Kendari, Mei 2026 — Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus diperkuat melalui kegiatan patroli partisipatif yang melibatkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Masyarakat Peduli Api (MPA), fasilitator lapangan SCF, serta masyarakat di sekitar kawasan hutan dan wilayah Perhutanan Sosial (PS). Kegiatan ini dilaksanakan pada 19–20 Mei 2026 di wilayah KPH Unit XXI Laiwoi Tenggara Kabupaten Konawe, KPH Unit XXIV Gularaya Kabupaten Konawe Selatan, dan Taman Hutan Raya (Tahura) Nipa-Nipa Kota Kendari.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Program Result Based Payment Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (RBP

REDD+) Green Climate Fund (GCF) Output 2 Sulawesi Tenggara, dengan Sulawesi Community Foundation (SCF) sebagai Lembaga Perantara. Program ini berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam mendukung perlindungan kawasan hutan, pengurangan risiko kebakaran, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan berbasis masyarakat.

Kepala KPH Gula Raya, Nurmadin, menyampaikan bahwa patroli lapangan tidak hanya dilakukan untuk pemantauan kawasan, tetapi juga menjadi ruang dialog langsung dengan masyarakat yang beraktivitas di sekitar hutan.

"Kami menemukan masyarakat yang beraktivitas dan mereka banyak memberikan kepada kami informasi. Kita juga sudah melakukan edukasi mengenai titik-titik rawan kebakaran,"

— Nurmadin

Melalui patroli tersebut, tim gabungan melakukan pemantauan kawasan rawan, menyampaikan imbauan kepada masyarakat, serta memperkuat edukasi mengenai bahaya kebakaran hutan dan pentingnya menjaga kawasan hutan secara bersama-sama.

Ketua MPA Desa Sanggula, Jumrin, mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi kunci penting dalam upaya pencegahan kebakaran di tingkat tapak. Ia juga mengungkapkan,

"Setelah kami turun lapangan, kami mengimbau masyarakat yang kami temui agar dapat menjaga dan waspada dengan kondisi sekitar agar terhindar dari kebakaran."





Ia juga menambahkan bahwa kegiatan patroli sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran, khususnya di wilayah Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat.

"Harapan kami, dengan adanya patroli ini, kami dari MPA sangat berterima kasih dan kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Karena kegiatan seperti ini sangat membantu dalam mencegah kebakaran di lokasi PS ini."

Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, kelompok masyarakat, dan para pihak lainnya dalam menjaga kawasan hutan dari ancaman kebakaran. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan dan mendukung agenda penurunan emisi berbasis bentang alam di Sulawesi Tenggara.

Mencegah Api Menjaga Karbon Hutan

Patroli Masyarakat Peduli Api berkontribusi
pada target pengurangan emisi REDD+

Hutan merupakan penyimpan karbon alami yang sangat penting. Pohon, vegetasi bawah, dan tanah menyimpan karbon yang telah terakumulasi selama puluhan hingga ratusan tahun. Ketika hutan terbakar atau mengalami kerusakan, karbon tersebut dilepaskan ke atmosfer dalam bentuk gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim.

Karena itu, menjaga hutan tetap utuh menjadi bagian penting dalam **Program Result Based Payment (RBP) REDD+**. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui patroli rutin oleh Masyarakat Peduli Api (MPA) bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Tahura Nipa-Nipa, pemerintah desa, dan Sulawesi Cipta Forum (SCF).

Patroli tidak hanya bertujuan mencari titik api. Kegiatan ini juga mendeteksi berbagai aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran maupun degradasi hutan, seperti pembukaan lahan, bekas pembakaran, dan perubahan kondisi kawasan. Informasi tersebut menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan tindak lanjut sebelum kerusakan menjadi lebih besar. Pada periode Mei 2026, patroli dilakukan di **20 lokasi** pada **tiga wilayah kerja**. Hasilnya menunjukkan **tidak ditemukan kebakaran hutan dan lahan aktif**, namun terdapat beberapa temuan penting yang memerlukan tindak lanjut bersama.

"Setiap ancaman yang berhasil dideteksi lebih awal adalah kesempatan untuk menjaga hutan tetap utuh dan karbon tetap tersimpan."

Patroli MPA dalam Angka



Waktu & Proses Patroli



Tahukah Anda?

Kebakaran hutan tidak hanya menghancurkan vegetasi. Kebakaran juga melepaskan karbon yang tersimpan di pohon dan tanah ke atmosfer. Karena itu, setiap kebakaran yang berhasil dicegah berarti membantu menjaga cadangan karbon tetap tersimpan di dalam hutan.

Mengapa **Patroli MPA** Penting?

Patroli Masyarakat Peduli Api berkontribusi pada target pengurangan emisi REDD+

Tanpa Patroli MPA



Ancaman terlambat diketahui

Bekas pembakaran, bukaan lahan, atau aktivitas berisiko tidak segera terdeteksi.



Respons menjadi lebih lambat

Penanganan dilakukan setelah risiko berkembang.



Risiko kerusakan hutan meningkat

Kebakaran dan pembukaan lahan berpotensi meluas.



Karbon terlepas ke atmosfer

Kerusakan hutan meningkatkan emisi gas rumah kaca.

Dengan Patroli MPA



Ancaman terdeteksi lebih awal

Bekas pembakaran, bukaan lahan, dan aktivitas berisiko dapat segera diketahui.



Respons lebih cepat

Koordinasi dilakukan bersama KPH, pemerintah desa, dan pihak terkait.



Kerusakan hutan dapat dicegah

Risiko kebakaran dan degradasi hutan dapat ditekan.



Karbon tetap tersimpan

Hutan tetap menjalankan fungsinya sebagai penyimpan karbon dan mendukung tujuan REDD+.



Tiga Temuan Prioritas



1. Bekas Pembakaran Lahan

Lokasi: HKm Indah Lestari

Tim patroli menemukan bekas pembakaran lahan, indikasi api yang menjalar ke areal HKm, serta aktivitas perambahan. Temuan ini direkomendasikan untuk diverifikasi lebih lanjut bersama KPH dan Dinas Kehutanan.



2. Pembukaan Lahan Berskala Besar

Lokasi: HKm Tumbu Marome

Patroli menemukan pembukaan lahan sekitar 80 hektare menggunakan alat berat. Aktivitas tersebut dihentikan saat patroli berlangsung dan dilaporkan untuk proses tindak lanjut.



3. Bukaian Lahan di Kawasan Konservasi

Lokasi: Tahura Nipa-Nipa

Patroli menemukan dua titik bukaian lahan baru di kawasan konservasi. Temuan ini menjadi dasar rekomendasi untuk memperkuat pengawasan, penegakan batas kawasan, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Menjaga Hutan Adalah Menjaga Iklim

Patroli MPA merupakan bagian dari sistem deteksi dini yang membantu mengidentifikasi ancaman terhadap hutan sebelum berkembang menjadi kebakaran atau kerusakan yang lebih luas. Melalui patroli, koordinasi lintas pihak, dan tindak lanjut terhadap setiap temuan, risiko kehilangan tutupan hutan dapat ditekan. Dengan hutan yang tetap terjaga, karbon tetap tersimpan di dalam biomassa dan tanah, sehingga mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca yang menjadi tujuan Program RBP REDD+.

Workshop Pembentukan Desa ProKlim Perkuat Aksi Iklim Masyarakat dan Implementasi REDD+ di Sulawesi Tenggara

Kendari, 3 Juni 2026 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Workshop Pembentukan Desa Program Kampung Iklim (ProKlim) dan Penginputan Data ke Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) di Hotel Same Boutique Kendari, Rabu (3/6). Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Program Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 di Sulawesi Tenggara yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) melalui Yayasan Sulawesi Cipta Forum sebagai Lembaga Perantara, serta dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pokja REDD+ Sulawesi Tenggara yang diketuai oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara.

Workshop ini diikuti oleh perwakilan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa dan kelurahan, kelompok masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon di Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sekaligus mendorong pembentukan dan registrasi Desa ProKlim ke dalam SRN-PPI sebagai sistem nasional pencatatan aksi iklim.

Dalam pemaparannya, perwakilan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Umul Zaman Salihin, ST., M.Si, menjelaskan bahwa REDD+ merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca nasional melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan,

konservasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta peningkatan cadangan karbon hutan.

Menurutnya, implementasi REDD+ di Sulawesi Tenggara melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, akademisi, serta Yayasan Sulawesi Cipta Forum sebagai Lembaga Perantara yang mendukung pengelolaan dan penyaluran pendanaan program. Program ini tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta penguatan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.



“Program REDD+ di Sulawesi Tenggara dirancang untuk menciptakan manfaat lingkungan sekaligus manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan program,” ujar Umul Zaman.



la menambahkan bahwa Program REDD+ Sulawesi Tenggara didukung melalui skema pendanaan RBP REDD+ GCF yang memiliki total alokasi sekitar Rp21 miliar untuk pelaksanaan program selama periode 2024–2027. Program ini berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat, tata kelola kehutanan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian deforestasi, serta pengembangan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak.

Pada sesi berikutnya, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Sulawesi Tenggara sekaligus Koordinator Tim Teknis IGRK dan ProKlim, Awaluddin, S.SiT., M.AP, menjelaskan bahwa Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan program nasional yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan

iklim melalui berbagai aksi adaptasi dan mitigasi di tingkat lokal. Ia menyampaikan bahwa hingga tahun 2024, Sulawesi Tenggara telah memiliki 152 lokasi ProKlim yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Melalui dukungan pendanaan REDD+, pemerintah daerah menargetkan penguatan dan pengembangan 23 lokasi ProKlim yang tersebar di Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Selatan.

“Melalui Program REDD+, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalokasikan dukungan pendanaan sekitar Rp2,2 miliar untuk pengembangan ProKlim. Dukungan ini akan digunakan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat, pembentukan komunitas ProKlim, sekolah lapang iklim, serta berbagai aksi lingkungan seperti penanaman mangrove,” jelas Awaluddin.

la menambahkan bahwa lokasi-lokasi sasaran dipilih dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan kawasan hutan yang dijaga dan dikelola oleh masyarakat. Oleh karena itu, ProKlim menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung implementasi REDD+ di tingkat tapak sekaligus memperkuat kontribusi masyarakat terhadap upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Fungsional Ahli Madya DLH Sulawesi Tenggara, Untung Ratu, S.T., M.Si, menambahkan bahwa ProKlim merupakan instrumen penting dalam mendorong aksi iklim berbasis masyarakat. Berbagai kegiatan seperti penghijauan, pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, pemanfaatan lahan secara berkelanjutan, serta penguatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim menjadi bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi yang dapat dilakukan langsung oleh masyarakat.

“Keberhasilan ProKlim sangat ditentukan oleh keberlanjutan aksi yang dilakukan masyarakat. Karena itu, penguatan kapasitas kelompok masyarakat menjadi salah satu fokus utama yang harus terus didorong,” katanya.

Sebagai contoh praktik baik, Lurah Watu-Watu, Suriatno Daud, S.Pt., M.AP, memaparkan pengalaman Kelurahan Watu-Watu dalam mengelola berbagai kegiatan ProKlim. Berbagai inisiatif yang telah dilakukan meliputi pengelolaan sumber daya air, pertanian organik, pemanfaatan pekarangan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penghijauan, hingga perlindungan daerah resapan air.

Menurutnya, tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah serta keterbatasan sarana dan

prasarana pengelolaan sampah. Namun demikian, keberadaan Bank Sampah Kodya dan berbagai kegiatan edukasi masyarakat terus didorong untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Sementara itu, Dafid Pratama, S.Si, Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Tenggara, memberikan pelatihan teknis mengenai penginputan aksi adaptasi, mitigasi, dan kelembagaan ke dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). Ia menegaskan bahwa pencatatan aksi iklim masyarakat menjadi penting untuk mendokumentasikan kontribusi nyata desa dan kelurahan dalam mendukung target penurunan emisi daerah maupun nasional.

“Melalui SRN-PPI, berbagai aksi yang telah dilakukan masyarakat dapat terdokumentasi, terukur, danmenjadibagiandarikontribusi Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. Karena itu, kualitas data dan kelengkapan dokumentasi menjadi aspek yang sangat penting,” ujarnya.

Melalui workshop ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai penyelenggaraan ProKlim, konsep REDD+, pencatatan aksi adaptasi dan mitigasi, penguatan kelembagaan masyarakat, hingga tata cara penginputan data ke SRN-PPI. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah desa dan kelurahan yang terdaftar dalam sistem nasional, memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, serta mendorong lahirnya aksi-aksi iklim yang terukur dan berkelanjutan di tingkat tapak.

Program ini merupakan bagian dari implementasi RBP REDD+ GCF Output 2 di Sulawesi Tenggara yang didukung oleh BPD LH melalui Yayasan Sulawesi Cipta Forum sebagai Lembaga Perantara. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, kelompok komunitas, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, program ini mendorong penguatan kapasitas masyarakat dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengelolaan hutan dan lingkungan yang berkelanjutan, serta pencatatan aksi iklim yang terukur melalui SRN-PPI. Pengembangan 23 lokasi ProKlim di Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Selatan diharapkan dapat memperkuat kontribusi masyarakat terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca sekaligus mendukung pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim di Sulawesi Tenggara.



Seminar Inventarisasi Gas Rumah Kaca Perkuat Dasar Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon di Sulawesi Tenggara

Kendari, 4 Juni 2026 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Seminar Perhitungan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) Tahun 2026 di Hotel Same Boutique Kendari. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memaparkan hasil inventarisasi emisi dan serapan gas rumah kaca, memperkuat kualitas data sektoral, serta mendukung penyusunan kebijakan pembangunan rendah karbon di daerah.

Seminar ini merupakan bagian dari Program Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 yang mendukung penguatan tata kelola perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon di Sulawesi Tenggara. SCF dalam program ini bertindak sebagai Lembaga Perantara (Lemtara).

Kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi lintas sektor untuk memvalidasi data emisi dan serapan gas rumah kaca, meningkatkan kualitas pelaporan, serta memastikan tersedianya data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan mitigasi perubahan iklim di daerah.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Sulawesi Tenggara sekaligus Koordinator Tim Teknis IGRK dan ProKlim, Awaluddin, S.SiT., M.AP, menjelaskan bahwa inventarisasi gas rumah kaca merupakan instrumen penting dalam mendukung target nasional pengendalian perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon.



“Sulawesi Tenggara saat ini tengah memperkuat berbagai instrumen pengelolaan perubahan iklim, termasuk penyusunan Dokumen IGRK Sultra 2025–2027, Dokumen Forest Reference Emission Level (FREL), serta Rencana Aksi Daerah REDD+ sebagai dasar perencanaan penurunan emisi di sektor kehutanan dan penggunaan lahan,” jelas Awaluddin.

Ia juga menyampaikan bahwa Sulawesi Tenggara memperoleh alokasi pendanaan REDD+ untuk mendukung target penurunan emisi periode 2025–2027, termasuk target penurunan emisi sektor Forest and Other Land Use (FOLU) sebesar 789 ribu ton CO₂.

Selain memaparkan capaian dan target program, Awaluddin menjelaskan bahwa hasil evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup masih menunjukkan perlunya penguatan kualitas dokumen inventarisasi gas rumah kaca daerah. Beberapa catatan yang ditemukan antara lain belum optimalnya proses verifikasi dan validasi data, belum tersusunnya analisis ketidakpastian, belum dilaksanakannya verifikasi terhadap hasil penurunan emisi, serta masih ditemukannya anomali data pada sejumlah sektor. Menurutnya, seminar ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki kualitas data dan memperkuat akuntabilitas pelaporan inventarisasi gas rumah kaca Sulawesi Tenggara.

Dalam pemaparan hasil inventarisasi, Dafid Pratama, S.Si, Penelaah Teknis Kebijakan DLH Sulawesi Tenggara, menjelaskan bahwa total emisi gas rumah kaca Sulawesi Tenggara pada tahun 2025 tercatat sekitar 35.721,66 Gg CO₂e. Sektor energi menjadi penyumbang emisi terbesar dengan nilai sekitar 40.067,44 Gg CO₂e, diikuti sektor proses industri dan penggunaan produk (IPPU), pertanian, serta limbah.

Di sisi lain, sektor kehutanan dan penggunaan lahan masih berperan penting sebagai penyerap karbon. Pada tahun 2025, sektor ini mampu menyerap sekitar 8.600,23 Gg CO₂e, sehingga membantu menekan total emisi bersih daerah. Dafid menambahkan bahwa

tren peningkatan emisi dalam beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari berkembangnya aktivitas industri di Sulawesi Tenggara. Pertumbuhan industri pengolahan nikel dan smelter turut berkontribusi terhadap peningkatan emisi



pada sektor energi dan IPPU, sehingga diperlukan strategi pengendalian emisi yang berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Herry Ibnu Nurcahyo, ST dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara memaparkan bahwa sektor energi masih didominasi penggunaan batubara yang mencapai sekitar 85 persen dari total bauran energi daerah.

Pada tahun 2025, emisi sektor energi tercatat mencapai sekitar 22,5 juta ton CO₂ per tahun, dengan subsektor pembangkit listrik menjadi penyumbang terbesar.

Menurutnya, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi salah satu strategi penting untuk menekan emisi sektor energi. Saat ini, kontribusi EBT dalam bauran energi daerah baru mencapai sekitar 4,35 persen, dengan kapasitas terpasang sekitar 29,50 MW. Pemanfaatan EBT tersebut diperkirakan mampu mengurangi emisi hingga 151 ribu ton CO₂ per tahun.

Pada sesi berikutnya, Toto Gunardi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari memaparkan perkembangan data penutupan lahan di Sulawesi Tenggara. Ia menekankan pentingnya data tutupan lahan sebagai dasar perhitungan emisi dan serapan karbon sektor FOLU.

Ia menjelaskan bahwa perubahan tutupan lahan akibat pembukaan kawasan untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu sumber utama emisi sektor FOLU. Kawasan pertambangan nikel menjadi salah satu wilayah yang memerlukan pemantauan berkala untuk memastikan perubahan tutupan lahan dapat teridentifikasi dengan baik.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh yang didukung verifikasi lapangan menjadi langkah penting untuk meningkatkan akurasi data penutupan lahan dan menghasilkan perhitungan emisi serta serapan karbon yang lebih akurat.

Melalui seminar ini, para peserta yang berasal dari perangkat daerah, instansi teknis, akademisi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan memperoleh ruang untuk melakukan validasi data, berbagi masukan teknis, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyusunan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sulawesi Tenggara.

Seminar ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memperkuat arsitektur REDD+ daerah melalui penyusunan Dokumen IGRK Sultra 2025–2027, Forest Reference Emission Level (FREL), dan Rencana Aksi Daerah REDD+. Ketiga dokumen tersebut diharapkan menjadi landasan penting dalam mencapai target penurunan emisi sektor FOLU sekaligus mendukung implementasi pembangunan rendah karbon di Sulawesi Tenggara.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama para pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat kualitas inventarisasi gas rumah kaca sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan rendah karbon. Data emisi dan serapan karbon yang semakin akurat diharapkan dapat mendukung implementasi REDD+, mempercepat pencapaian target penurunan emisi daerah, serta mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim.

**“Hutan lahan kering primer masih menjadi penyimpan karbon terbesar di Sulawesi Tenggara. Selain itu, kawasan mangrove juga memiliki peran strategis dalam penyerapan karbon biru atau blue carbon,”
ungkap Toto.**

Rehabilitasi hutan bukan hanya soal menanam pohon

Alimuddin, S.P., M. Si.

Kepala KPH Unit XXI Laiwoi Tenggara



Q Sejauh ini, bagaimana Rantek memastikan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan?

Rencana teknis (Rantek) harus disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Kalau tidak sesuai, masyarakat akan kesulitan saat melaksanakan kegiatan. Karena itu, penyusunannya harus berbasis data lapangan, misalnya melihat topografi apakah lahannya datar atau berbukit, jenis tanah, hingga kondisi vegetasi yang ada. Semua informasi tersebut hanya bisa diperoleh dengan melakukan verifikasi langsung di lapangan. Dengan begitu, rencana yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokasi penanaman.

Q Sejauh ini, apa tantangan terbesar dalam penyusunan Rantek?

Tantangan terbesar sebenarnya bukan pada penyusunan dokumennya, tetapi pada pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam membangun pemahaman masyarakat. Banyak warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan menggantungkan hidup dari hasil hutan sehingga memiliki cara pandang yang berbeda terhadap fungsi hutan. Di sisi lain, rehabilitasi hutan bertujuan memulihkan fungsi ekologis sekaligus memberikan manfaat ekonomi melalui tanaman yang ditanam. Karena itu, kami perlu terus meningkatkan kapasitas kelompok tani agar mereka memahami bahwa kegiatan RHL dilakukan untuk kepentingan mereka sendiri dan manfaatnya juga akan mereka rasakan dalam jangka panjang.

Q Sejauh ini, seperti apa keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Rantek?

Masyarakat dilibatkan sejak awal proses. Kami terlebih dahulu menyampaikan rencana kegiatan rehabilitasi kepada mereka, kemudian bersama-sama melihat kondisi lahan, melakukan pengukuran, dan menyusun rencana teknis. Dengan cara ini, masyarakat memahami bahwa kegiatan penanaman bertujuan meningkatkan kualitas lahan yang mereka kelola. Keterlibatan sejak tahap perencanaan membuat proses

penyusunan Rantek menjadi lebih partisipatif sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap kegiatan rehabilitasi.

Q Apa harapan Bapak ke depan?

Harapan kami, kapasitas masyarakat terus meningkat sehingga mereka semakin memahami pentingnya menjaga hutan. Yang tidak kalah penting, mereka juga dapat merasakan manfaat ekonomi dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Dengan begitu, kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan.

Data RHL

1. Lokasi penanaman 15 lokasi ps
2. Luasan yg sudah tertanam 128 ha
3. Bibit yang terbagi 16.446

Penutup

Buletin ini kami hadirkan sebagai media berbagi pembelajaran dan capaian dalam implementasi Program RBP REDD+ GCF di Sulawesi Tenggara. Keberhasilan pelaksanaan program tidak lepas dari dukungan dan kolaborasi semua pihak yang telah bekerja sama menjaga kelestarian hutan.

Kami menyampaikan penghargaan yang tulus kepada seluruh mitra kerja: BAPPEDA Sulawesi Tenggara, Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara, Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Taman Hutan Raya (Tahura) Nipa-Nipa, Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Pemerintah Desa, akademisi, mitra pembangunan, sektor privat, koperasi, perbankan, serta masyarakat Sulawesi Tenggara.

Terima kasih khusus kami sampaikan kepada Tim Program Provinsi Sulawesi Tenggara:

- **Penanggung Jawab Program:** Dr. Arham, S. P., M. Sc..
- **Program Manager:** Muhammad Sultan
- **Tim Keuangan dan Admin:** Suryana Siang R, Khaerunnisa Muhiro, Muhammad Aqsa
- **Tim Perencanaan, Pengelolaan GRK, Gender dan Monitoring:** Muliadi Makmur, Ahsan Setiawan, Namira Arsa, Mulyadi
- **Program Officer:** Ismail Al-Jamily, Eddy Hamka, Niklani, Sairuddin Bae
- **Tim Admin dan Keuangan:** Alma Amalia Annisa dan La Ode Abdul Rahman
- **Fasilitator Safeguard:** Ismunandar
- **Field Officer:** La Ode Ramadhan P, Ahmad Tawakkal, Nurpalah, Muhammad Abdul Rajab, Benyamin Boka, Makdis Askul Pehala, Wa Dewi
- **Staf PPK:** Artasnin Achmad.

Semoga sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

Tim Redaksi

- Pemimpin Redaksi: Muliadi Makmur
- Redaktur Pelaksana: Arif Maulana Talitti Mattata, Rafiqah Ulfah Masbah
- Penulis: Arif Maulana Talitti Mattata
- Desainer Grafis, Layout, dan Editor: Arkil Akis
- Fotografer: Ismunandar, Makdis Askul Pehala, Wa Dewi



Jl. Taman Goyen Raya I, Kassi-Kassi, Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia.
0411-898-7896 | info@scf.or.id